

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL

Hasnawati

STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Email: hasnawati@stai-tbh.ac.id

Abstrak

Pembelajaran pendidikan Agama Islam berbasis multikultural adalah salah satu model pembelajaran pendidikan Agama Islam yang dikaitkan pada keragaman yang ada, entah itu keragaman agama, etnis, bahasa dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena banyak kita jumpai di sekolah-sekolah umum (bukan bercirikan Islam) di dalam satu kelas saja terdiri dari berbagai siswa yang sangat beragam sekali, ada yang berbeda agama, etnis, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Multikultural bukan berarti paham yang hendak menyeragamkan keanekaan, paham ini justru menjunjung tinggi keragaman dan menghargai perbedaan. Titik temu multikultural bukan pada bentuk peleburan untuk menunggal, akan tetapi pada sikap toleransi terhadap keragaman itu sendiri. Agar dapat memfungsikan, dan merealisasikan hal tersebut, diperlukan suatu cara yang sistematis, terencana, berdasarkan pendekatan interdisipliner, serta mensistesisikan pendidikan Islam dengan disiplin atau konsep paradigma lain. Karena perkembangan masyarakat semakin kompleks dan tentunya akan mengarahkan potensi yang ada pada diri manusia dengan cepat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat dari kompleksitas sosial masyarakat itu sendiri. Inilah peranan pendidikan agama yang perlu dikedepankan, kini dan di masa depan, di samping peran-peran lain dalam meningkatkan kualitas keberagaman para pemeluk agama.

Kata Kunci : Pembelajaran, Multikultural, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural, Agama maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah negara kesatuan republik indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga

menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan (Ainul Yaqin, 2005:3). Merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama disebut sebagai masyarakat "multikultural". Tetapi pada pihak lain, realitas "multikultural" tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang dapat menjadi "integrating force" yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.

Beberapa psikolog menyatakan bahwa budaya menunjukkan tingkat intelegensi masyarakat. Sebagai contoh, gerakan lemah gemulai merupakan ciri utama masyarakat Bali. Oleh karena kemampuannya untuk menguasai hal itu merupakan ciri dari tingkat intelligensinya. Sementara manipulasi dan rekayasa kata dan angka menjadi penting dalam masyarakat Barat. Oleh karenanya "keahlian" yang dimiliki seseorang itu menunjukkan kepada kemampuan intelegensinya

Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannya dengan konflik yang sering muncul. Pertama, pandangan Primordialis. Kelompok ini menganggap, perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras (dan juga agama) merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama. Kedua, pandangan kaum Instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan "Islam" misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem-back up kepentingan politiknya. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau mengalah dari preference yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari bahkan tidak terjadi. Ketiga, kaum Konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis.

Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah.

Keragaman ini dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti yang sekarang dihadapi bangsa ini. Korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kekerasan, separatisme, Perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain, adalah bentuk nyata sebagai bagian dari Multikulturalisme itu (Ainul Yaqin, 2005:4).

Salah satu faktor yang diyakini oleh masyarakat dalam kelangsungan hidup manusia adalah pendidikan. Pendidikanlah yang mampu menstimulus perubahan sosial kearah terbentuknya suatu kondisi masyarakat yang dicita-citakan. Asumsi bahwa untuk mencapai kemajuan peradaban maka salah satu alternatif faktor pendidikan. Hal ini disebabkan masalah pendidikan adalah merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan, bukan saja sangat penting, bahkan masalah pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan negara itu.

Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan.

Pendidikan sebagai bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai, baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Begitu juga dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju kearah cita-cita tertentu, maka yang merupakan masalah pokok bagi pendidikan ialah arah tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan pendidikan yang ditentukan oleh negara merupakan kesepakatan bersama yang patut dihormati. Sebagai suatu kesepakatan, tujuan pendidikan bukanlah merupakan suatu dogma yang tidak berubah bahkan merupakan patokan yang terus bergerak ke depan untuk lebih menyempurnakan upaya untuk memerdekakan warganya (Tilaar, 2016:112).

Pendidikan di Indonesia secara umum, seringkali diklaim kurang mampu dalam menjawab tantangan, perubahan, dan tuntutan masyarakat, sehingga *outputnya* kurang memiliki kesiapan riil bagi kepentingan profesi dan juga pengembangan bagi disiplinnya ilmu. Pendidikan yang seharusnya berwatak dinamis, kreatif telah terjerat oleh kepentingan-kepentingan emosional yang sifatnya semu. Banyak muatan yang sifatnya sesaat telah terikat sedemikian rupa seolah menjadi inti yang harus digeluti. Sehingga wajar saja kritik tajam melanda dunia pendidikan pada umumnya, karena sampai hari ini dirasakan pendidikan selalu disibukkan pada masalah-masalah teknis yang sangat dangkal, seperti praktek-praktek pendidikan yang mengharapkan lulusannya mampu berproduksi secara nyata, siap pakai, sesuai dengan perkembangan industri, dan semacamnya tanpa mempertimbangkan lagi aktivitas pendidikan yang lebih esensial dan substansial.

Pengajaran agama berkaitan dengan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal dan nonformal. Pengajaran agama dengan jelas telah diatur di dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 12 ayat (1a) dengan jelas menyebutkan bahwa pengajaran Agama (di dalam undang-undang tersebut disebutkan pendidikan Agama) harus diberikan di semua satuan pendidikan baik formal maupun nonformal. Bahkan di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah asing harus memberikan pelajaran agama dari pengajar yang seagama dengan peserta-didik (Tilaar, 2016:223).

Secara umum pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Agama Islam. Ajaran-ajaran tersebut terdapat dalam al-qur'an dan al-hadits. Untuk kepentingan pendidikan, dengan melalui proses ijtihad para ulama mengembangkan materi

pendidikan Agama Islam pada tingkat yang lebih rinci. Mata pelajaran pendidikan Agama Islam tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas,2004:2).

Apa yang kita saksikan selama ini, entah karena kegagalan pembentukan individu atau karena yang lain, nilai-nilai yang mempunyai implikasi sosial dalam istilah Qodry Azizy disebut dengan moralitas sosial atau etika sosial atau AA. Gym menyebutnya dengan krisis akhlak hampir tidak pernah mendapat perhatian serius. Padahal penekanan terpenting dari ajaran Islam pada dasarnya adalah hubungan antar sesama manusia (mu'amalah bayna al-nas) yang sarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas sosial itu (Abdul Majid dan Dian Andayani,2004:136).

Untuk memperbaiki pendidikan terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana manusia belajar dan bagaimana cara mengajarnya. Kedua kegiatan tersebut dalam rangka memahami cara manusia mengkonstruksi pengetahuannya tentang objek-objek dan peristiwa-peristiwa yang dijumpai selama kehidupannya. Manusia akan mencari dan menggunakan hal-hal atau peralatan yang dapat membantu memahami pengalamannya (C. Asri Budiningsih, 2005:56).

Agar dapat memfungsikan, dan merealisasikan hal tersebut, diperlukan suatu cara yang sistematis, terencana, berdasarkan pendekatan interdisipliner, serta mensistesisikan pendidikan Islam dengan disiplin atau konsep paradigma lain. Karena perkembangan masyarakat semakin kompleks dan tentunya akan mengarahkan potensi yang ada pada diri manusia dengan cepat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat dari kompleksitas sosial masyarakat itu sendiri.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Multikultural

Secara sederhana multikultural dapat dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah Negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negarapun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal.

Dengan demikian, Multikultural merupakan sunnatullah yang tidak dapat ditolak bagi setiap Negara-bangsa di dunia ini.

Multikultural dapat pula dipahami sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multicultural seperti ini dapat dipandang sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Disini, multicultural dapat dipandang sebagai landasan budaya (*Cultural Basis*) tidak hanya bagi kewargaan dan kewarganegaraan, tetapi juga bagi pendidikan.

Multikultural ternyata bukanlah suatu pengertian yang mudah. Di dalamnya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu “multi” yang berarti plural, “kultural” berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena plural bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi politis, social, ekonomi. Oleh sebab itu pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Tilaar: 83).

Dalam tiga dasawarsa ini, kebijakan yang sentralistik dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional dan damai. Kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-Bangsa, betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Konteks global setelah tragedi September 11 dan invasi Amerika Serikat ke Irak serta hiruk pikuk politis identitas di dalam era reformasi menambah kompleknya persoalan keragaman dan antar kelompok di Indonesia.

Pandangan dunia ”Multikultural” secara substantif sebenarnya tidaklah terlalu baru di Indonesia. Sebagai Negara-negara yang menyatakan kemerdekaannya sejak lebih setengah abad silam, Indonesia sebenarnya telah memiliki dan terdiri dari sejumlah kelompok etnis, budaya, Agama, dan lain-lain,

sehingga Negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat “Multikultural”.

Realitas sosial masyarakat Indonesia semacam itu sangat sulit dipungkiri dan diingkari. Untuk itu, keragaman, atau kebhinekaan atau multikultural merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan mendatang.

2. Pendekatan Multikultural dalam Pendidikan Agama : Urgensi dan Signifikansi

Pendidikan Multikultural adalah suatu keniscayaan. Ia merupakan paradigma dan metode untuk menggali potensi keragaman etnik dan kultural nusantara, dan mewadahnya dalam suatu manajemen konflik yang memadai. Pendidikan multikultural merupakan kearifan dalam merespon dan mengantisipasi dampak negatif globalisasi yang memaksakan homogenisasi dan hegemoni pola dan gaya hidup. Ia juga jembatan yang menghubungkan dunia multipolar dan multikultural yang mencoba direduksi isme dunia tunggal kedalam dua kutub saling berbenturan antara Barat-Timur dan Utara-Selatan (Zakiyuddin Baidhawiy,2005:17).

Selama ini, pendidikan di Indonesia sedikit menyentuh persoalan bagaimana menghargai kepercayaan-kepercayaan keagamaan dan keragaman kultural yang sangat kaya. Ada kecenderungan Homogenisasi yang diintrodusir secara sistematis melalui dunia pendidikan dibawah payung kebudayaan nasional, hegemoni kebudayaan jawa sebagai pusat dan kebudayaan lain sebagai pinggiran, dan pemiskinan budaya dengan meringkas keragaman identitas kultural sejumlah propinsi. Proses homogenisasi, hegemoni dan pemiskinan budaya itu diajarkan dalam *Civic education*, seperti pancasila, penataran P4 dan bahkan Pendidikan agama (*religious education*).

Memang pergeseran-pergeseran sosial tersebut merupakan sesuatu yang lumrah karena tidak dikenal sebelumnya. Masing-masing komunitas menutup dirinya sendiri dan mempunyai suatu persatuan semu yang dipaksakan. Kita lihat sebelumnya didalam pendidikan multikultural tidak ada pengelompokan-

pengelompokan komunitas yang mengagungkan nilai-nilai kelompok sendiri tetapi yang mengenal akan nilai-nilai hidup budaya/komunitas yang lain. Oleh sebab pendidikan multikultural tidak akan dikenal adanya fanatisme atau fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama, karena masing-masing komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.

Setidaknya ada empat alasan utama mengapa Multikultural harus diakomodir dalam system pendidikan kewarganegaraan umumnya, dan Pendidikan Agama khususnya. Diantaranya adalah sebagai berikut (Zakiyuddin Baidhawiy,2005:21).

a. Realitas Bangsa yang sangat Plural.

Kekayaan akan keanekaragaman-agama, etnik, dan kebudayaan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi kekayaan ini merupakan khazanah yang patut dipelihara dan memberikan nuansa dan dinamika bagi bangsa, dan dapat pula merupakan titik pangkal perselisihan, konflik vertikal dan horizontal.

Perbedaan kelompok-kelompok keagamaan, kelompok etnik, dan kelompok sosio-kultural yang semakin meningkat dari segi ukuran dan signifikansi politiknya dalam beberapa tahun terakhir, telah melahirkan tuntutan agar kebijakan dan program-program sosial responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan keragaman tersebut. Memenuhi tuntutan ini akan menghendaki lebih kepekaan kultural (*cultural sensitivity*), koalisi pelangi dan negosiasi-kompromi secara pluralistik pula. Ketegangan etnik dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu dapat diakselerasi, dan akibatnya terjadi persaingan terhadap berbagai sumberdaya yang terbatas seperti lapangan pekerjaan, perumahan, kekuasaan politik, dan sebagainya.

Permasalahan pokok yang dihadapi para pendidik dan pergerakan sosial-keagamaan pada era kemajemukan dan era multikultural adalah bagaimana agar masing-masing tradisi keagamaan tetap dapat mengawetkan, memelihara, melanggengkan, mengalihgenerasikan, serta mewariskan kepercayaan dan tradisi yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang mutlak, namun pada saat yang sama juga menyadari sepenuhnya keberadaan kelompok tradisi keagamaan lain yang juga berbuat serupa. Selain memperkuat identitas diri dan kelompoknya, upaya

apa yang dilakukan para pendidik sosial keagamaan dalam masing-masing tradisi untuk juga menjaga kebersamaan, kohesi sosial, dan keutuhan bersama? Jika disadari perlunya hal tersebut, lalu apa implikasi dan konsekuensi dari cara, metode, pilihan materi, serta teknik pendidikan dan pengajaran agama yang disajikan kepada masyarakat yang bercorak plural-majemuk-terbuka seperti sekarang ini? Masih adakah "ruang" untuk berpikir sejanak dan berdiskusi bersama kelompok-kelompok yang ada ditengah-tengah masyarakat majemuk dan multikultural ini? Apa pilihan-pilihan yang akan diambil? Jika tidak ada pilihan, apa implikasinya? Jika ada, apa pula konsekwensinya? (Amin Abdullah,2005:2-3)

Semua persoalan krusial tersebut tidak akan terpecahkan tanpa meninggalkan konsep masyarakat majemuk atau plural dan beralih ke konsep masyarakat multikultural.

b. Pengaruh Budaya dan Etnisitas terhadap Perkembangan Manusia

Dalam banyak cara etnisitas dapat dipandang sebagai fenomena persepsi diri (*self-perception*): suatu komunitas etnik adalah komunitas yang mempercayai dirinya sebagai memiliki asal-usul etnik yang sama. Berbagai kebiasaan-kebiasaan kultural yang sama, mempunyai nenek moyang yang sama, sejarah dan mitologi bersama.

Kebudayaan membentuk perilaku, sikap dan nilai manusia. Perilaku manusia adalah hasil dari proses sosialisasi, dan sosialisasi selalu terjadi dalam konteks lingkungan etnik dan kultural tertentu. Etnisitas dapat didefinisikan sebagai kesadaran kolektif kelompok yang menanamkan rasa memiliki yang berasal dari keanggotaan dalam komunitas yang terikat oleh keturunan dan kebudayaan yang sama.

Manusia adalah makhluk sosial yang membawa karakter biologis dan psikologis alamiah sekaligus warisan dari latar belakang historis kelompok etniknya, pengalaman kultural dan warisan kolektif. Ketika seorang pendidik mengklaim bahwa prioritas utamanya adalah memperlakukan semua siswa sebagai umat manusia, tanpa memandang identitas etnik, latar belakang budaya, atau status ekonomi, ia telah menciptakan suatu paradoks. Kemanusiaan seseorang

tidak dapat diasingkan dan dipisahkan dari kebudayaan dan etnisitasnya. Pengaruh budaya dan etnisitas sejak awal telah nyata dan terus menjangkau keseluruhan proses perkembangan dan pertumbuhan manusia.

c. Benturan Global antar Kebudayaan

Pemisahan terbesar antara umat manusia dan sumber konflik utama berasal dari kebudayaan atau peradaban. Meskipun negara-bangsa akan menjadi aktor kuat, tetapi konflik utama dalam politik global akan terjadi antar bangsa dan kelompok kebudayaan yang berbeda-beda.

Globalisasi telah melahirkan paradoks. Pemberontakan permanen atas keseragaman dan integrasi. Yang ada adalah budaya bukan negara. Bagian bukan keseluruhan. Sekte bukan agama. Disamping suku, agama juga merupakan medan pertempuran. Apapun bentuk universalisme yang telah memberi karunia dalam sejarah, seperti monoteisme yahudi, kristen dan islam. Dalam perwujudan modernnya tiga agama besar ini bersifat parokial daripada kosmopolitan.

Dalam proses globalisasi, integrasi pasar dunia, negara-bangsa, dan teknologi yang memungkinkan individu, korporasi dan negara-bangsa menjangkau pelosok dunia lebih jauh dalam waktu relatif cepat dan biaya lebih murah, juga meninggalkan mereka yang tidak mampu membayar tiket globalisasi.

Karena itu, para pendukung multikultural yakin bahwa penghargaan pada kemajemukan, akan menjawab ketegangan antar kebudayaan (Zakiyuddin Baidhawiy, :26-30).

d. Efektivitas Belajar tentang Perbedaan

Problem efektivitas belajar-mengajar untuk menanamkan kesadaran akan perbedaan. Salah satu premis pendidikan multikultural menyatakan bahwa belajar-mengajar merupakan proses kultural yang terjadi dalam konteks sosial.

Pengalaman Indonesia cukup menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dalam rangka mengatasi dan mengelola keragaman agama, etnik dan kultural. Pendidikan agama termasuk civic-education pada masa lampau sebenarnya juga menyinggung masalah pentingnya kerukunan antarumat beragama, namun lebih

bersifat permukaan. Istilah "kerukunan" yang diintrodusir lewat indoktrinasi sangat artifisial, karena tidak mencerminkan dialektika, dinamika apalagi kerjasama.

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural

Pendidikan agama islam tidak harus sama dengan 50 tahun lalu ketika dunia pergaulan budaya, ekonomi, hiburan, dan perdagangan belum berkembang seperti sekarang ini.

Secara umum pendidikan agama islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama islam. Ajaran-ajaran tersebut terdapat dalam al-qur'an dan al-hadits untuk kepentingan pendidikan, dengan melalui proses ijtihad para ulama mengembangkan materi pendidikan agama islam pada tingkat yang lebih rinci. Mata pelajaran pendidikan agama islam tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran islam. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka menyadari perbedaan tantangan historis antara klasik-skolastik, era modernitas, dan terlebih lagi pada era modernita tingkat lanjut (post-modern), diperlukan keberanian intelektual untuk merumuskan ulang pola pendidikan islam, baik yang menyangkut materi maupun metodologi (M. Amin Abdullah: 77).

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1 (a) disebutkan bahwa: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang

seagama”(Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , 2005), 101).

Maka dari itu di dalam penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di sekolah-sekolah umum, meskipun sudah ada kebijakan dari pihak sekolah bahwa siswa yang beragama non islam boleh ikut di dalam pelaksanaan pelajaran PAI yang ada, tetapi pihak sekolah masih tetap menyediakan guru agama yang seagama dengan mereka.

Pembelajaran pendidikan agama islam berbasis multikultural adalah salah satu model pembelajaran pendidikan agama islam yang dikaitkan pada keragaman yang ada, entah itu keragaman agama, etnis, bahasa dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena banyak kita jumpai di sekolah-sekolah umum (bukan bercirikan islam) di dalam satu kelas saja terdiri dari berbagai siswa yang sangat beragam sekali, ada yang berbeda agama, etnis, bahasa, suku, dan lain sebagainya.

Dalam proses pembelajaran pendidikan agama islam berbasis multikultural, ada tiga fase yang harus betul-betul diperhatikan oleh seorang pendidik, diantaranya ialah:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Apalagi dalam merencanakan pembelajaran pendidikan agama islam yang siswanya terdiri dari beraneka ragam (tidak hanya islam saja).

2. Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat guru. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam proses ini, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru (pendidik), diantaranya ialah: aspek pendekatan dalam pembelajaran, aspek strategi dan metode dalam pembelajaran dan proseduar pembelajaran.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Pada hakekatnya evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi.

Alat evaluasi ada yang berbentuk tes dan ada yang berbentuk non tes. Alat evaluasi berbentuk tes adalah semua alat evaluasi yang hasilnya dapat dikategorikan menjadi benar dan salah. Misalnya, alat evaluasi untuk mengungkapkan aspek kognitif dan psikomotor. Alat evaluasi non-tes hasilnya tidak dapat dikategorikan benar-salah, dan umumnya dipakai untuk mengungkap aspek afektif (Sutrisno, 2005:152).

KESIMPULAN

Pembelajaran pendidikan Agama Islam berbasis multikultural adalah salah satu model pembelajaran pendidikan Agama Islam yang dikaitkan pada keragaman yang ada, entah itu keragaman agama, etnis, bahasa dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena banyak kita jumpai di sekolah-sekolah umum (bukan bercirikan islam) di dalam satu kelas saja terdiri dari berbagai siswa yang sangat beragam sekali, ada yang berbeda agama, etnis, bahasa, suku, dan lain sebagainya.

Akan tetapi perlu kita pahami bersama bahwasanya Multikultural bukan berarti paham yang hendak menyeragamkan keanekaan, paham ini justru menjunjung tinggi keragaman dan menghargai perbedaan. Titik temu multikultural bukan pada bentuk peleburan untuk menunggal, akan tetapi pada sikap toleransi terhadap keragaman itu sendiri. Inilah peranan pendidikan agama yang perlu dikedepankan, kini dan di masa depan, di samping peran-peran lain dalam meningkatkan kualitas keberagaman para pemeluk agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, 2005 *Pendidikan Agama Era Multikultural-multireligius*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Asri Budiningsih, C. (2005), *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Azra, Azyumardi, (2005), Pendidikan Agama : Membangun Multikulturalisme Indonesia, Lihat dalam Prakata Buku Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural miliknya Zakiyuddin Baidhawiy.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, (2005), *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta:
- Depdiknas, (2003), *Kurikulum 2004 SMA, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Depdiknas, 2003
- Majid, Abdul, Dian Andayani, (2004), *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
- Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokusmedia, 2005)
- Sutrisno, (2005), *Revolusi Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Tilaar, (2005), *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Kompas,
- Yaqin, Ainul, (2005) , *Pendidikan Multikultural, Cross cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media.